

DINAMIKA PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH PADA MASA PENJAJAHAN JEPANG DI YOGYAKARTA TAHUN 1942-1945

DYNAMICS OF MUHAMMADIYAH EDUCATION DURING THE JAPANESE OCCUPATION IN YOGYAKARTA IN 1942-1945

Faisal Anas

Departemen Sejarah, Universitas Gadjah Mada
Jalan Sosio Humaniora, Bulaksumur, Yogyakarta, 55281
Email: anasfaisal214@gmail.com

DOI: 10.36424/jpsb.v9i1.368

*Naskah Diterima: 31 Agustus 2022 Naskah Direvisi: 26 April 2023
Naskah disetujui: 04 Mei 2023*

Abstrak

Indonesia atau yang sebelumnya bernama Hindia Belanda menjadi bagian dari wilayah penjajahan Jepang pada tahun 1942. Jepang sebagai penguasa baru memiliki kebijakan berbeda dibandingkan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pada masa ini, umat Islam mendapat ruang yang lebih luas dalam berbagai bidang. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam yang memiliki pengaruh di Indonesia turut mendapat tempat dalam kebijakan baru dari Jepang. Meskipun terkesan memberikan ruang gerak lebih kepada umat Islam, namun dalam bidang pendidikan, terdapat banyak kebijakan baru yang menghalangi perkembangan pendidikan Islam, tidak terkecuali Muhammadiyah. Tulisan berusaha untuk mengungkap pendidikan Muhammadiyah khususnya di Yogyakarta selama masa penjajahan Jepang yang berlangsung sejak tahun 1942 hingga tahun 1945. Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis yang terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik, kritik sumber (verifikasi), interpretasi, dan historiografi. Berdasarkan hasil penelitian, kedatangan Jepang di Yogyakarta memberikan pengaruh baru selama masa pendudukannya, khususnya bagi Muhammadiyah. Pendidikan sebagai salah satu bidang sosial yang digarap oleh Muhammadiyah di satu sisi mendapat dukungan jika dibandingkan pada masa kolonialisme Hindia Belanda. Akan tetapi, di sisi lainnya terdapat beberapa kebijakan yang bertentangan dengan keyakinan umat Islam seperti *Seikirei* dan menghambat pertumbuhan sekolah seperti kurangnya dukungan finansial yang berdampak pada tutupnya sekolah-sekolah Muhammadiyah.

Kata Kunci: Jepang, Muhammadiyah, Pendidikan, Yogyakarta.

Abstract

Indonesia which is formerly known as the Dutch East Indies became part of the Japanese occupational territory in 1942. Japan as the new ruler had a different policy than the colonial government of the Dutch East Indies. At this time, Muslims gained more space in various fields. Muhammadiyah as one of the Islamic organizations that have influence in Indonesia also got a place in the new policy of Japan. Although it seems to give more wiggle room to Muslims, but in the field of education, there were many new policies that hinder the development of Islamic education, not least Muhammadiyah. The paper seeks to reveal muhammadiyah education, especially in Yogyakarta during the Japanese colonial period that lasted from 1942 to 1945. This study uses a critical historical method consisting of four stages, namely heuristics, source criticism (verification), interpretation, and historiography. Based on the results of the study, the arrival of The Japanese in Yogyakarta gave a new influence during the occupation, especially for Muhammadiyah. Education as one of the social fields employed by Muhammadiyah on the one hand received support when compared to the colonialism of the Dutch East Indies. However, on the other hand, there are some policies that are contrary to the beliefs of Muslims such as Seikirei and hinder the growth of schools such as the lack of financial support that has an impact on the closure of Muhammadiyah schools.

Keywords: Japan, Muhammadiyah, Education, Yogyakarta.

PENDAHULUAN

Upaya Jepang untuk menjalin hubungan dengan umat Islam di Hindia Belanda telah berlangsung sejak pertengahan 1920-an. Tujuan utamanya adalah untuk melangsungkan upaya ekspansi oleh *Dai Nippon*. Pada tahun 1927, setelah berlangsungnya konggres Islam Pertama di Arab Saudi, Jepang mengirimkan seorang “ahli” Islam bernama Profesor T. Kanaya untuk memperkuat hubungan Islam Jepang dan Indonesia. Namun, ia tidak memperoleh hasil yang berarti selama kunjungannya ke Indonesia karena pengawalan ketat pemerintah Kolonial saat itu (Benda, 1985: 133-134).

Sekitar periode ini muncul studi mengenai Islam dan majalah-majalah yang membahas mengenai agama Islam di Jepang. Beberapa kalangan dikirimkan untuk mengadakan agitasi yang bertujuan untuk menegaskan posisi Jepang sebagai pelindung Islam. Selanjutnya, Jepang mengirimkan empat orang ke Arab dan Mesir untuk mempersiapkan langkah-langkah propaganda. Tidak hanya itu, pemerintah Jepang juga meningkatkan kedatangan jumlah mahasiswa Islam dan guru-guru

Islam, baik dari Timur Tengah maupun negara-negara Asia lainnya untuk datang ke Jepang (Benda, 1985: 134).

Pada tahun 1935, didirikan Masjid pertama di Kobe dan kemudian disusul pendirian sebuah masjid di ibukota yang peresmianya dilakukan secara meriah bahkan dihadiri oleh tamu-tamu dari luar negeri, termasuk Pangeran Hussein dari Yaman. Perserikatan Islam Jepang (*Dai Nippon Kaikyo Kyokai*) dibentuk pada tahun 1938. Jenderal Senjuro Hayashi sebagai “Bapak Islam Jepang” ditunjuk sebagai ketuanya (Benda, 1985: 134).

Pada tahun 1939, Perserikatan Islam Jepang mengundang orang-orang Islam dari luar negeri untuk menghadiri Pameran Islam di Tokyo dan Osaka tanggal 5-29 November. Untuk pertama kalinya, perhatian umat Islam teralihkan dari Timur Tengah ke Jepang. Sebulan sebelum pameran diadakan, MIAI (Madjelis Islam A’la Indonesia) sebagai perwakilan Islam Indonesia diizinkan untuk mengadakan konferensi khusus yang menerima perwakilan dari Tokyo (Noer: 263).

Langkah-langkah ini juga diperkuat dengan propaganda Jepang di Indonesia. Mereka menyebarkan persamaan mengenai ajaran Islam dan Shinto yang mengumbar harapan bahwa suatu saat kaisar akan beralih ke Agama Islam dan melukiskan kejayaan Islam di bawah Kaisar-Khalifah Jepang Raya. Pernyataan ini membangkitkan harapan dari umat Islam akan adanya pembebasan dari penguasa Kristen yang tidak mereka inginkan. Setidaknya, langkah ini telah berbuah dukungan terhadap Jepang di Sumatera saat mereka melakukan pendaratan di pulau tersebut dibanding Jawa (Benda, 1985: 135).

Sementara itu, jatuhnya Belanda ke tangan Jerman pada tanggal 15 Mei 1940 menyebabkan berbagai kegoncangan di wilayah jajahannya. Salah satu wilayah yang terpengaruh adalah Hindia Timur atau Indonesia yang memiliki sumber daya alam melimpah. Berita mengenai penyerbuan ini mendatangkan berbagai reaksi di Hindia Belanda. Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Jhr. Mr. A.W.L. Tjarda van Skatenborgh Stachouwer menyatakan keadaan darurat bagi Hindia Belanda (Oktorino, 2013: 2).

Menyadari kejatuhan Belanda, Jepang yang menginginkan wilayah Hindia Belanda segera mengambil langkah untuk penguasaan. Mula-mula mereka

menggunakan cara halus untuk menguasai Hindia Belanda. Akan tetapi, sikap keras dari Pemerintah Hindia Belanda pada akhirnya berujung pada langkah keras yang diambil Jepang. Pada akhirnya, Jepang berhasil memaksa pemerintah Hindia Belanda untuk menyerahkan Indonesia pada Maret 1942 (Ricklefs, 2011: 294).

Kedatangan Jepang memberikan warna baru bagi perkembangan Indonesia. Berbagai kebijakan diterapkan oleh Jepang guna meraih simpati warga Indonesia agar mau bekerjasama dalam menghadapi perang. Berbeda dengan Pemerintah Hindia Belanda yang tidak melibatkan umat Islam dalam berbagai kegiatan, Jepang mengutamakan Islam dalam kegiatan. Hal ini tentu tidak bisa dilepaskan dari besarnya jumlah umat Islam saat itu yang merupakan aset penting untuk menjaga keberlangsungan Jepang saat perang (Kuntowijoyo, 1985: 49). Salah satu kebijakan yang diterapkan saat itu adalah yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Umumnya pada saat itu pendidikan agama Islam hanya ada diadakan oleh orang Islam sendiri dalam bentuk sekolah, madrasah, dan pondok pesantren. Sejak awal Jepang kedatangannya berusaha untuk membatasi kegiatan pengajaran agama.

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam yang telah berumur kurang lebih tiga puluh tahun saat itu juga turut merasakan perubahan kekuasaan yang terjadi di Indonesia pada saat itu. Organisasi yang telah berdiri sejak tahun 1912 ini telah melakukan berbagai aktivitas sosial termasuk pendidikan sebagai salah satu pilar utamanya (Darban dan Pasha, 2009: 97). Yogyakarta yang merupakan tempat lahir Muhammadiyah sekaligus pusat dari kegiatan Muhammadiyah di Indonesia turut merasakan perubahan baru dalam aktivitas organisasi, termasuk pendidikan sebagai salah satu bidang garapan utama Muhammadiyah.

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam yang telah berumur kurang lebih tiga puluh tahun saat itu juga turut merasakan perubahan kekuasaan yang terjadi di Indonesia pada saat itu. Organisasi yang telah berdiri sejak tahun 1912 ini telah melakukan berbagai aktivitas sosial termasuk pendidikan sebagai salah satu pilar utamanya (Darban dan Pasha, 2009: 97). Yogyakarta yang merupakan tempat lahir Muhammadiyah sekaligus pusat dari kegiatan

Muhammadiyah di Indonesia turut merasakan perubahan baru dalam aktivitas organisasi, terutama dalam bidang pendidikan.

Pustaka yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah *Muhammadiyah Potret yang Berubah* karya M.T. Arifin. Buku ini menjelaskan mengenai perkembangan Muhammadiyah sejak awal berdirinya hingga pertengahan tahun 1980-an. Salah satu pembahasan dalam buku ini menguraikan perkembangan Muhammadiyah selama penjajahan Jepang, termasuk salah satunya bidang pendidikan (Arifin, 2016). Arifin memberikan penjelasan secara luas kebijakan Muhammadiyah di wilayah Indonesia masa penjajahan Jepang. Sementara itu di Yogyakarta tidak dijelaskan secara lebih jauh.

Selanjutnya adalah buku karya Harry J. Benda yang berjudul *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*. Benda menjelaskan perkembangan politik umat Islam sejak akhir masa penjajahan Belanda hingga kekuasaan Jepang. Pemerintahan Militer Jepang memberikan ruang yang besar untuk umat Islam agar mendapat bantuan dari umat Islam dalam menghadapi Perang Dunia Ke-2 (Benda, 1985). Benda dalam hal ini adalah menguraikan umat Islam secara luas, dan kurang menyentuh bidang pendidikan sebagai salah satu yang terpengaruh kebijakan Jepang.

Pustaka terakhir yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Sejarah Nasional Indonesia VI Zaman Jepang dan Zaman Republik* karya Mawarti Djonoed Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. Keduanya menggambarkan kondisi Indonesia sejak masa Penjajahan Jepang hingga masa Orde Baru. Pada masa penjajahan Jepang diuraikan mengenai berbagai kebijakan Jepang untuk masyarakat Indonesia yang umumnya bersifat militeristik (Poesponegoro dan Notosusanto, 2010). Uraian terkait pendidikan dalam buku ini merupakan penjelasan secara luas mengenai kebijakan bagi sekolah negeri dan sekolah swasta sehingga tidak bisa menyentuh detail yang lebih kecil dalam setiap wilayah. Dari penjelasan beberapa tulisan di atas dapat dilihat bahwa kebijakan pendidikan masa pendudukan Jepang khususnya di Yogyakarta kurang begitu mendapat tempat karena waktunya yang terbatas kurang lebih selama tiga tahun. Padahal kebijakan

pendidikan ini memberikan pengaruh besar terhadap kebijakan pada masa berikutnya.

Pendidikan Muhammadiyah di Yogyakarta telah mengalami perkembangan pesat selama masa Belanda. Ketika Jepang datang, Muhammadiyah dihadapkan pada kebijakan yang berlainan dari masa sebelumnya. Kondisi ini membuat pimpinan Muhammadiyah yang berada di Yogyakarta menerapkan kebijakan agar mampu menjaga keberadaan Muhammadiyah. Berdasarkan pemaparan diatas, penulis merumuskan permasalahan yang hendak dibahas yaitu 1). Bagaimana Kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Jepang di Indonesia? 2). Bagaimana kondisi pendidikan Muhammadiyah di Yogyakarta pada masa penjajahan Jepang? 3). Bagaimana reaksi Muhammadiyah menghadapi kebijakan pendidikan Jepang?. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui kondisi pendidikan Muhammadiyah khususnya di Yogyakarta pada masa pendudukan Jepang dan respon Muhammadiyah menghadapi kebijakan pendidikan yang diterapkan pemerintah pendudukan Jepang agar bisa tetap bertahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah kritis. Metode sejarah kritis adalah suatu proses untuk menguji dan menganalisis secara kritis mengenai rekaman-rekaman serta peninggalan masa lampau (Gottschalk, 2008: 35). Dalam metode ini terdapat empat langkah yang dilakukan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

Pertama, heuristik merupakan langkah kerja sejarawan untuk mengumpulkan sumber atau bukti-bukti sejarah. Langkah kerja heuristik bertujuan untuk menemukan dan mengumpulkan jejak-jejak peristiwa sejarah agar kerangka pemahaman yang diperoleh dapat disusun dengan jelas, lengkap, dan menyeluruh menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer yang digunakan adalah *Besluiten van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie 22 den Augustus 1914 (No. 81)* dan *Besluiten van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie 2 den September 1921 (No. 36)*. Sumber primer dan sekunder dikumpulkan dari sejumlah perpustakaan dan lembaga seperti Perpustakaan Pimpinan Pusat

Muhammadiyah, Balai Layanan Pustaka DIY, Jogja Library Center, Perpustakaan Kolese Santo Ignatius, dan koleksi pribadi penulis. Sumber sekunder seperti buku dan artikel digunakan untuk memperkuat sumber primer.

Kedua, kritik sumber merupakan tahap pengkajian terhadap keaslian dan kredibilitas sumber-sumber yang diperoleh yaitu dari segi fisik dan isi sumber. Ketiga, interpretasi adalah upaya penafsiran atas fakta-fakta sejarah dalam kerangka rekonstruksi realitas masa lampau. Interpretasi dalam upaya rekonstruksi sejarah masa lampau adalah memberikan kembali relasi antar fakta sebagai bukti terhadap apa yang pernah terjadi di masa lampau. Keempat, historiografi atau penulisan yaitu penyampaian sintesis dalam bentuk karya sejarah.

PEMBAHASAN

Pemerintahan Jepang di Yogyakarta

Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda berakhir 9 Maret 1942 setelah Letnan Jenderal Ter Poorten menyatakan menyerah pada Jepang. Jepang sebagai penguasa baru memiliki tujuan menguasai Hindia Belanda untuk mengeksploitasi bahan mentahnya, oleh karena itu diusahakan agar dilakukan penaklukan tanpa menimbulkan gejolak di lapisan bawah. Wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Pemerintah Militer Angkatan Darat (Tentara Keduapuluh Lima) yang meliputi Sumatera dengan pusatnya di Bukittinggi, Pemerintah Militer Angkatan Darat (Tentara Keenambelas) untuk wilayah Jawa dengan pusatnya di Jakarta, dan Pemerintah Angkatan Laut (Armada Selatan Kedua) untuk wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku yang berpusat di Makassar (Ricklefs, 2011: 297).

Pemerintahan di Jawa dijalankan oleh Letjen. Hitoshi Imamura sebagai pimpinan Tentara Keenambelas. Jawa dibagi menjadi tiga pemerintahan militer yang disebut *gunseibu* yang meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jawa kemudian dibagi menjadi 17 karesidenan atau *syuu* seperti pada masa penjajahan Belanda. Tujuh belas *syuu* ini antara lain Banten, Batavia, Bogor, Priangan, Cirebon, Pekalongan, Semarang, Banyumas, Pati, Kedu, Surabaya, Bojonegoro, Madiun, Kediri, Malang, Besuki, dan Madura. Meskipun dari segi wilayah luasnya masih sama, namun dari segi pemerintahan terdapat perbedaan.

Pada masa Belanda, residen hanya merupakan pembantu gubernur, namun saat ini *syuu* atau karesidenan menjadi daerah pemerintahan tersendiri yang dipimpin oleh seorang *syuucookan*. Ia menjadi pelaksana eksekutif dan legislatif layaknya gubernur pada masa sebelumnya. *Syuu* terdiri dari beberapa *syi* (kotapraja) dan *ken* (kabupaten). *Ken* dibagi menjadi beberapa *gun* (kawedanan) dan *gun* dibagi menjadi beberapa *son* (kecamatan). *Son* kemudian dibagi menjadi lagi dalam beberapa *ku* (desa) (Suwarno, 2003: 80).

Selain itu, terdapat juga wilayah swapraja atau yang pada masa Belanda disebut *vorstenlanden* yang berubah namanya menjadi *Kooti*, yakni Surakarta, Yogyakarta, Pakualaman, dan Mangkunegaran. Sultan Hamengku Buwono IX sendiri diangkat menjadi *koo* pada tanggal 1 Agustus 1942. Seperti pada masa sebelumnya, Yogyakarta terbagi menjadi dua wilayah, yakni Kadipaten Pakualaman dan Kasultanan Yogyakarta. Kemudian, pada bulan September 1942, *gunseikan* melantik para *syuu*. Wilayah Yogyakarta terdiri dari empat kabupaten, yaitu Bantul, Gunungkidul, Sleman, dan Kulonprogo. Pembagian wilayah masih mempertahankan sistem pada masa Hindia Belanda, hanya saja di wilayah Yogyakarta ditambah unit terkecil seperti rukun tetangga (*tonarigumi*) dan kampung (*aza*) untuk mempermudah mobilisasi (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977: 296). Pemerintahan Dai Nippon melakukan pelatihan militer secara lebih massif jika dibandingkan tentara Belanda. Berbagai pelatihan militer yang dilakukan oleh Jepang bahkan berdampak hingga tahun-tahun pasca perang berakhir.

Pada masa awal kedatangannya, Jepang mengeluarkan Undang-undang Nomor 3 atau yang lebih lazim disebut Maklumat Nomor 3, tertanggal 20 Maret 1942 yang melarang pembicaraan mengenai struktur politik di Indonesia. Undang-undang ini kemudian diperkuat dengan Undang-undang Nomor 23 yang dikeluarkan tanggal 27 Juli 1942 tentang pembubaran semua partai politik, organisasi-organisasi, serikat buruh, serta perkumpulan yang ada di Indonesia (kecuali perkumpulan plesiran dan kesenangan, olahraga, pengetahuan kesenian dan pendidikan, serta perkumpulan sosial dan pembagian barang-barang) (Arifin, 2016: 181).

Kebijakan Pendidikan Masa Pendudukan Jepang

Kebijaksanaan Jepang terhadap rakyat Indonesia memiliki dua prioritas: menghapuskan pengaruh Barat dan memobilisasikan masyarakat untuk kemenangan Jepang. Seperti halnya Belanda, mereka bermaksud menguasai Indonesia demi kepentingan mereka sendiri. Mereka menghadapi permasalahan yang sama dan menggunakan pemecahan masalah yang tidak jauh berbeda dengan Belanda. Pemerintah Jepang bahkan menggunakan hukum kolonial Belanda yang telah berlaku sebelumnya kecuali yang bertentangan dengan kepentingan mereka (Ricklefs, 2011: 300).

Dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama setelah kedatangannya, pemerintah Militer Jepang berusaha secepat mungkin untuk memulihkan kondisi di Indonesia agar seperti sediakala. Pelayanan umum seperti perhubungan kereta api, pelayanan pos, telepon, dan telegram, serta lembaga pendidikan dengan segera dibuka. Sekolah-sekolah negeri yang semula ditutup saat kedatangan Jepang diperintahkan agar segera dibuka lagi tanpa melalui prosedur berbelit-belit. Kebijakan ini berbanding terbalik dengan sekolah swasta yang memerlukan izin dari Pemerintah Jepang. Hasilnya, ada beberapa perguruan swasta yang boleh dibuka dan ada yang harus tetap ditutup (Buchori, 2007: 26).

Pada masa ini, sekolah umum yang dibuka antara lain:

- 1) sekolah rakyat enam tahun (*kokumin gakko*), dan sekolah desa atau sekolah pertama
- 2) sekolah menengah pertama tiga tahun
- 3) sekolah menengah tinggi tiga tahun

Selain itu, ada juga sekolah guru yang dibuka yaitu:

- 1) sekolah guru dua tahun (*shoto shihan gakko*)
- 2) sekolah guru empat tahun (*chutto shihan gakko*)
- 3) sekolah guru enam tahun (*koto shihan gakko*) (Poesponegoro dan Notosusanto, 2010: 91-92).

Dalam suasana yang baru, pembukaan sekolah-sekolah, salah satunya sekolah guru negeri yang berada di Pulau Jawa. Sekolah swasta tetap ditutup. Bagi

siswa sekolah guru swasta yang belum menamatkan pendidikannya dapat melanjutkan sekolah guru negeri yang salah satunya berada di Yogyakarta. Pada masa ini juga dilakukan pemisahan siswa laki-laki dan siswa perempuan. Dengan demikian, terdapat dua jenis sekolah, yaitu Sekolah Guru Laki-laki (SGL) dan Sekolah Guru Perempuan (SGP). Lama studi sekolah ini adalah 4 tahun (Buchori, 2007: 28).

Siswa tamatan SGL dan SGP dapat melanjutkan studi mereka ke jenjang yang lebih di Sekolah Guru Menengah Tinggi (*Kootoo Shihan Gakkoo*). Sekolah ini lebih sering disebut dengan SGMT. Hanya ada satu sekolah SGMT di Pulau Jawa, yaitu di Jakarta. Ada tiga jurusan di sekolah ini, yaitu Jurusan Matematika dan Pengetahuan Alam, Jurusan Sastra, dan Jurusan Pendidikan Jasmani. Sekolah ini hanya menerima siswa laki-laki. Sedangkan untuk siswa perempuan terdapat Sekolah Guru Kepandaian Putri (SKGP) yang hanya memiliki pelajaran soal kesejahteraan rumah tangga (Buchori, 2007: 28).

Pada masa ini, suasana dalam kegiatan pendidikan lebih terkekang karena sekolah diarahkan untuk tujuan militer. Dalam kegiatan pembelajaran suasana militeristik Jepang sangat terasa. Tujuan akademik terpinggirkan pada pelaksanaan pendidikan. Murid-murid pada masa ini diharuskan untuk melakukan kerja bakti, seperti mengumpulkan bahan-bahan untuk perang, menanam bahan makanan, membersihkan asrama dan memperbaiki jalan-jalan. Mereka juga diajarkan pelatihan jasmani (Buchori, 2007: 29).

George Mac Turnan Kahin (2013: 85) menyebut berbagai kebijakan pendidikan Jepang tersebut pada akhirnya berpengaruh terhadap kaum muda yang berusia antara 15 hingga 21 tahun. Mereka umumnya mengenyam pendidikan rendah yang memperoleh propaganda Jepang secara berkepanjangan dan intens. Propaganda tersebut akhirnya menimbulkan nasionalisme militan yang bercampur dengan perasaan anti Barat.

Pelajaran bahasa Jepang menggantikan bahasa Belanda yang sebelumnya merupakan bahasa utama. Meskipun begitu, ada sebuah fenomena dimana guru-guru Indonesia yang mampu mengajarkan bahasa Jepang dalam waktu singkat.

Mereka umumnya adalah guru-guru yang mendapat pendidikan formal pada masa Hindia Belanda.

Pemerintah Jepang berusaha menyatukan sekolah-sekolah untuk orang Indonesia agar menjadi satu kesatuan. Keputusan ini diambil untuk melebur pengkotak-kotakan sekolah yang diterapkan oleh Belanda. Pada masa Hindia Belanda, terdapat berbagai organisasi guru yang beraneka ragam dan saling bersaing (Buchori, 2007: 32).

Peluang untuk menjadi guru selama pendudukan Jepang menjadi lebih besar. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan Jepang yang tidak membatasi bahwa seseorang baru bisa menjadi guru jika memiliki ijazah *Kweekschool* atau sekolah guru. Kekurangan guru menjadikan peluang lulusan sekolah guru swasta untuk menjadi guru jauh lebih besar mengingat kebutuhan Jepang akan guru dalam jumlah besar saat itu untuk menyebarkan pengaruh *Nipponisasi* (Surjomihardjo, 1985:66).

Selain pengaruh Belanda, Jepang juga mewaspadaikan pengaruh Arab. Hal ini dilakukan untuk melepaskan bangsa Indonesia dari pusat agamanya. Setelah berhasil melepas pengaruh Arab, mereka berusaha mencegah paham “pan-Islam” yang menjadi perintang Jawa Baru di bawah pengaruh Jepang. Pada dasarnya, ketakutan Jepang pada pan Islamisme tidak jauh berbeda dengan Belanda. Akan tetapi, jika Belanda berusaha menyingkirkan pengaruh politik dari pusat Islam di Timur Tengah, maka Jepang tidak mengalami hal ini karena saat itu sedang terjadi perang. Hal ini menyebabkan Islam Indonesia semakin terasing dari Timur Tengah (Arifin, 2016: 189).

Jepang berusaha melarang pemakaian bahasa Arab pada tahun 1942 di sekolah-sekolah Islam, namun keinginan ini tidak dapat terlaksana. Sebagai ganti kegagalan ini, mereka memberikan syarat agar bahasa Jepang dijadikan sebagai salah satu materi pelajaran dan kurikulum pihak Jepang yang mengajarkan mata pelajaran non-agama diterima. Setidaknya, jika mereka gagal menghapuskan pengaruh Arab, mereka bisa menanamkan paham militerisme Jepang (Benda, 1985: 159).

Pada bulan Mei 1943, pemerintah Jepang melarang pengajaran agama yang tidak wajib di sekolah-sekolah lanjutan negeri. Pada bulan yang sama, semua guru-

guru Islam disatukan dalam sebuah organisasi, yaitu Pergabungan Guru Islam Indonesia dan secara bertahap semakin banyak sekolah Islam dan Arab yang dibuka kembali. Langkah –langkah yang diambil oleh Jepang memperlihatkan kewaspadaan mereka terhadap kekuatan Islam agar tidak memberontak suatu saat nanti (Benda, 1985:160).

Kondisi pendidikan Islam saat itu masih tetap diawasi secara ketat. Bahkan pemerintah Jepang masih menerapkan Ordonansi Guru 1925 yang dikeluarkan oleh Belanda. Isi dari Ordonansi ini salah satunya adalah mewajibkan seorang guru agama yang hendak mengajar melapor ke bupati. Selain itu, izin mengajar dari seorang guru dapat dicabut sewaktu-waktu oleh bupati jika guru agama tersebut melanggar peraturan (Wahyono, 2017:78). Peraturan tersebut merupakan penghalang bagi keberlangsungan lembaga pendidikan Islam di pedesaan. Campur tangan Jepang dalam pendidikan Islam terlihat dalam pengawasan yang dilakukan oleh administratur priyayi di tingkat kecamatan hingga kabupaten. Lebih dari satu tahun sejak kekuasaan Jepang hadir di Indonesia peraturan lembaga pendidikan masih terdesentralisasi dalam seksi pendidikan tingkat kabupaten.

Pada bulan Mei 1942 dibentuk *Shumubu* (Departemen Agama) yang memiliki fungsi sebagai penasihat umum dalam masalah agama antara lain bertugas mengangkat pegawai di bidang agama dan mengawasi buku-buku agama di tingkat pusat. Pada masa awal pembentukannya, *Shumubu* dipimpin oleh orang Jepang. Selanjutnya, *Shumubu* dipimpin oleh K.H. Hasyim Asyari, seorang tokoh Nahdhatul Ulama yang memiliki pengaruh besar pada masa itu. Di bawah *shumubu*, pemerintah membentuk *Shumuka* yang wilayahnya meliputi tingkat karesidenan dan dipimpin oleh seorang *Shumuka-cho*. Pembentukan *Shumubu* terpengaruh oleh *Kantoor voor Inlandsche Zaken* (Kantor untuk Urusan Pribumi) yang dibentuk oleh Belanda. Lembaga ini berdiri pada tahun 1899 dengan Snouck Hourgronje sebagai ketuanya (Suminto, 1985: 99). Fungsi lembaga tersebut terbatas pada penanganan perkara pribumi, khususnya yang beragama Islam.

Pada masa awal pembentukannya, keterlibatan *shumubu* masih terbatas pada bidang administratif dan keamanan. Namun dalam waktu yang tidak terlalu lama wewenangnya dikembangkan dengan kegiatan penghayatan keagamaan,

terutama dalam bidang pendidikan. Lembaga ini tidak menutup mata dari usul yang berada dibawahnya. Salah satu usulan yang diterima oleh *Shumubu* adalah dari K.H. Abu Dardiri yang merupakan kepala *Shumuka* di Banyumas agar pengajaran agama diberikan di seluruh sekolah desa yang ada di wilayahnya agar murid kelak menjadi orang yang baik budi pekertinya dan memiliki ketaatan (Steenbrink, 1974:86).

Pada Mei 1943, pemerintah militer Jepang mengumumkan untuk memberikan pendidikan bagi kiai dan ulama dari tujuh belas karesidenan dan empat swapraja di Jawa selama satu bulan di Jakarta. Latihan ini baru dilaksanakan pada bulan Juni dan diikuti oleh 68 orang kiai dan ulama. Pelatihan ini diawasi secara langsung oleh *Shumubu*. Pada bulan Agustus dan November kelompok-kelompok selanjutnya menyusul agar jangkauan kursus ini dapat mencakup kiai dan ulama secara lebih luas. Pengajar pada latihan ini merupakan tokoh-tokoh Islam pada materi tertentu dan tokoh militer serta para intelek jebolan pendidikan Barat. Beberapa tokoh pengajar ini antara lain: Haji Agus Salim, Dr. Abdul Karim Amrullah, Dr. Priyono, Haji Sanusi, Mr. Subagiyo, Husein Iskandar, Mr. Sujana, Kolonel Horie, Miyamoto, Abiko, Togo, R.M. Ngabehi Purbacaraka, Abdul Halim, Mas Mansur dan tiga tokoh lainnya (Arifin, 2016: 201-202).

Pemahaman kurikulum diberikan oleh pihak Jepang sejak awal tahun 1944. Mereka mengundang kepala-kepala sekolah Islam untuk menstadarisasikan silabus. Langkah ini kemudian diikuti dengan memberikan para guru sekolah Islam pelatihan di *Kaikyo Kyoshi Koshu-cho* di Jakarta. Selama masa pelatihan yang dilakukan sejak Februari 1944, para guru dan ulama menerima berbagai materi yang diarahkan menuju Meijifikasi. Beberapa materi tersebut antara lain: “Tujuan Perang Asia Timur Raya”, “Sejarah Umum” (membahas imperialisme Inggris dan Amerika), “Sejarah Jepang”, Hubungan antara Ilmu Agama dengan Ilmu Umum”, “Kewajiban Orang Beriman di Zaman Baru”, “Bahasa Jepang”, “Pengajaran Agama Islam”, “Ilmu Kesehatan dan Pelajaran Olah Raga”, “Eksklusisi” untuk memperoleh pemahaman yang berguna, serta “Kesan-kesan” (Kuntowijoyo, 1985: 49). Melalui pelatihan ini diharapkan pemahaman ulama akan semakin memahami

politik Jepang dan menetralsir pemberontakan petani disamping penanaman mengenai ideologi samurai.

Pemberian pendidikan kepada ulama dan kiai menjadi bentuk perhatian Jepang terhadap kekuatan umat Islam. Mereka menyadari besarnya kekuatan kiai dan ulama sebagai pemuka agama Islam dari tingkat tertinggi dalam negara hingga tingkat rendah di kawasan pedesaan. Sikap yang jauh bertolak belakang jika dibandingkan dengan pemerintah kolonial Belanda yang berusaha menjauhkan umat Islam dalam politik.

Pada masa penjajahan Jepang, bisa dikatakan sistem pendidikan yang dikembangkan lebih sederhana jika dibandingkan dengan periode Belanda. Untuk kualitas pendidikan pada masa pendudukan Jepang bisa dibilang tidak begitu baik. Meskipun begitu, sistem yang dikembangkan oleh Jepang jauh lebih egaliter. Pendidikan pada masa Jepang bisa dikatakan terbentuk secara cepat. Bila dibandingkan dengan masa Hindia Belanda yang berubah secara perlahan-lahan (evolitif) (Buchori, 2007: 39).

Pada tahun 1944, dikeluarkan Osamu Seirei No. 22/2604 mengenai penertiban sekolah swasta. Beberapa peraturan yang ada didalamnya antara lain pemberian kebebasan pembukaan sekolah baru kepada *Jawa Hokokai* dan sekolah swasta hanya diperbolehkan untuk membuka sekolah kejuruan dan bahasa. Pemberian izin kepada *Jawa Hokokai* tidak mengherankan mengingat fungsinya sebagai pendukung Jepang untuk memenangkan perang. Sedangkan kewenangan sekolah swasta yang hanya boleh membuka sekolah kejuruan dan bahasa dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan Jepang yang memerlukan tenaga pendidik (Poesponegoro dan Notosusanto, 2010: 95).

Kondisi Pendidikan Muhammadiyah Yogyakarta Masa Penjajahan Jepang

Muhammadiyah berdiri pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta (*Besluiten van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie 22 den Augustus 1914 (No. 81)*). Pendirinya adalah K.H. Ahmad Dahlan, seorang abdi dalem Kraton Yogyakarta. Tujuannya adalah untuk melindungi sekolah yang telah didirikannya pada tahun 1911 yang bernama *Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah* (Wahyono,

2013: 179) yang kemudian disamakan statusnya dengan Sekolah milik pemerintah. Pada masa itu K.H. Ahmad Dahlan berfokus membentuk dasar pendidikan Muhammadiyah, mengingat saat itu ruang gerak Muhammadiyah masih terbatas di Yogyakarta. Barulah sejak tahun 1921, ketika pemerintah Kolonial memberikan izin perluasan gerak Muhammadiyah ke seluruh Hindia Belanda (*Besluiten van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie 2 den September 1921 (No. 36)*) banyak berdiri sekolah-sekolah Muhammadiyah di berbagai wilayah.

Selanjutnya, pada masa kepemimpinan K.H. Ibrahim yang berlangsung sejak tahun 1923 hingga 1933 berfokus pada propaganda mengenai pentingnya sekolah Muhammadiyah. Sasaran propaganda ini diarahkan pada warga pedesaan yang kurang menganggap penting makna pendidikan untuk anak-anak mereka. Upaya ini pada akhirnya berbuah pada kesadaran akan kebutuhan pendidikan yang wajib dipenuhi (Setiawan, 2015: 210).

Puncak perkembangan pendidikan Muhammadiyah terjadi pada masa K.H. Hisyam selama tahun 1934 hingga tahun 1937. Sebagai figur yang sebelumnya menjadi Ketua Bagian Pendidikan Muhammadiyah, kebijakan selama kepemimpinannya diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan Muhammadiyah. Usaha ini berbuah pada meningkatnya sekolah Muhammadiyah yang memperoleh subsidi dari pemerintah Kolonial (Hadikusuma, 2010: 48-49).

Kepemimpinan K.H. Hisyam kemudian digantikan oleh K.H. Mas Mansur sejak tahun 1938. Pada masa ini, Muhammadiyah berupaya menyeimbangkan pendidikan dengan bidang-bidang lainnya. Kebijakan ini diambil berkaitan dengan kejadian pada masa K.H. Hisyam yang terlalu menaruh perhatian pada bidang pendidikan sehingga bidang lainnya terabaikan (Wahyono, 2013: 184).

Kedatangan Jepang mempengaruhi kepemimpinan Muhammadiyah. Pemerintah Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat (Putera) untuk menampung setiap kegiatan masyarakat pada tanggal 9 Maret 1943. Putera dipimpin oleh empat serangkai, yaitu Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansur. Salah satu tokoh dari empat serangkai, yaitu K.H. Mas Mansur sebelumnya merupakan Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah (Hadikusuma, 2010: 93).

Untuk mengatasi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh K.H. Mas Mansur, maka Wakil Ketua Pengurus Besar saat itu, yakni Ki Bagus Hadikusuma menjadi Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah. Ia didampingi oleh Haji A. Badawi dalam menjalankan kepemimpinan Muhammadiyah. Perkembangan pendidikan Muhammadiyah pada masa Ki Bagus Hadikusuma pada masa ini mengalami kemunduran karena pemerintahan Jepang menerapkan berbagai pembatasan termasuk pendidikan di dalamnya.

Sementara itu, badan hukum Muhammadiyah baru diberikan pada tahun 1943. Untuk memperoleh izin, Muhammadiyah mengubah tujuan organisasi sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, ada tiga tujuan baru Muhammadiyah, yaitu:

“Sesuai dengan kepercayaan untuk mendirikan bersama kemakmuran bersama seluruh Asia Timur Raya di bawah *Dai Nippon*, dan memang diperintahkan oleh Tuhan Allah, maka perkumpulan ini:

- a. Hendak mengajarkan agama Islam serta melatih hidup yang selaras dengan tuntunannya.
- b. Hendak melakukan pekerjaan perbaikan umum.
- c. Hendak memajukan pengetahuan dan kepandaian serta budi pekerti yang baik kepada anggota-anggotanya (Arifin, 2016: 186).

Perumusan tujuan baru ini ditanggapi oleh pemerintah Jepang dengan memberikan izin kepada Muhammadiyah. Dalam surat tanggapannya, ada beberapa catatan, yaitu:

1. Jika hendak mengubah tujuan yang tercantum dalam permohonan pokok harus memohon kepada *Gunseikan*.
2. Setiap tahun, setidaknya dua bulan setelah tutup buku, harus memberikan keterangan pekerjaan tahun lalu:
 - a. keterangan umum dari pekerjaan tahun lalu;
 - b. banyaknya masjid, langgar, tempat-tempat sembahyang dan penyiaran agama lainnya, sekolah-sekolah agama, pendirian-pendirian untuk kebaikan umum (diterangkan macamnya masing-masing di akhir tahun);

- c. banyaknya guru agama (kiai, dll), anggota dan penganut di akhir tahun;
 - d. perhitungan pemasukan dan pengeluaran orang dalam tahun lalu
3. Jika hendak menetapkan atau mengadakan perubahan aturan perkumpulan harus segera diberitahukan kepada *Gunseikan*.
 4. Perkumpulan tidak boleh mendirikan pergerakan perempuan serupa Fujinkai, pergerakan pemuda seperti *Seinendan*, dan pergerakan anak-anak serupa *Saenendan* (Majelis Diklitbang dan LPI PP Muhammadiyah, 2010: 117).

Perang yang terjadi telah memisahkan hubungan antarpulau di Indonesia. Ini tentu menjadi penghambat pertumbuhan Muhammadiyah untuk melaksanakan pertemuan rutin yang umumnya diselenggarakan setiap tahun. Segera setelah mendapat izin, Muhammadiyah segera mengambil langkah untuk menata kembali hubungan antara pusat dan cabang organisasi yang telah terhenti untuk mengetahui kekuatan Muhammadiyah yang sebenarnya. Oleh karena itu, pada tahun 1944 dilaksanakan kongres darurat di Yogyakarta. Melalui kongres ini diperoleh data mengenai perkembangan Muhammadiyah selama tahun 1942 hingga tahun 1944. Hal ini dilakukan untuk mengetahui jumlah sebenarnya anggota Muhammadiyah saat itu, mengingat banyak anggota yang telah meninggal akibat kebrutalan tentara Jepang. Hasil yang diperoleh saat itu anggota Muhammadiyah berkurang secara drastis. Selain karena banyaknya anggota yang telah meninggal dunia, pendataan ini juga tidak bisa dilakukan secara serentak karena kondisi saat itu yang tidak memungkinkan (Mulkhan, 1990: 45).

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Anggota Muhammadiyah

No.	Tahun	Kenaikan
1	1912	9
2	1913-1922	979
3	1923-1932	7.059
4	1933-1942	142.957
5	1943	-131.836

Sumber: (Mulkhan, 1990: 46)

Pemerintah Jepang melarang pergerakan dari satu pulau ke pulau lainnya dengan cara-cara keras. Pengurus Besar Muhammadiyah dengan segera mengambil langkah untuk menghadapi pelarangan ini. Muhammadiyah memberikan otonomi kepemimpinan berdasarkan kepulauan besar. Salah satunya adalah Muhammadiyah Sumatera yang dipimpin oleh AR Sutan Mansur. Ia mendapat hak penuh untuk bertindak menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi di Sumatera (Arifin, 2016: 190).

Tabel 2. Pertumbuhan Sekolah Muhammadiyah

No	Tahun	Sekolah
1	1912	-
2	1922	7
3	1932	1.003
4	1942	1.700
5	1952	2004

Sumber: (Mulkhan, 1990: 46)

Pada masa awal pemerintahan militer Jepang, sebagian lembaga pendidikan Muhammadiyah di Yogyakarta ada yang ditutup. Arifin (2016: 188) menyebut hingga tahun 1943, dari 135 sekolah yang telah berdiri sebelumnya, hanya 105 sekolah yang dibuka kembali. Kemungkinan sekolah yang ditutup adalah sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa Belanda sebagai pengantarnya, seperti HIS Muhammadiyah. Akan tetapi, seperti yang tertera dari tabel diatas, tidak terdapat pendataan secara rinci pendataan jumlah sekolah pada masa penjajahan Jepang di seluruh Indonesia karena pelarangan pemerintah Jepang untuk bergerak antara satu pulau ke pulau lainnya. Kebijakan ini berpengaruh besar terhadap kualitas pendidikan Muhammadiyah. Sekolah yang tetap buka menghadapi persoalan baru yaitu penghentian subsidi dari pemerintah. Pada masa ini, banyak sekolah Muhammadiyah yang akhirnya tutup karena kesulitan keuangan. Hanya sekolah-sekolah yang berada di dalam kota yang masih mampu bertahan (Kurniawati, 2012: 70).

Nasib pendidikan Muhammadiyah meskipun mengalami kemunduran masih lebih baik jika dibandingkan dengan nasib kaum Katolik dan Kristen di Yogyakarta. Mereka dianggap sebagai bagian dari Belanda. Oleh karena itu, semua

kegiatan misionaris dan zending termasuk pendidikan ditutup oleh Jepang (Wirawan, 2017: 58).

Kemunduran pendidikan Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dari perginya tokoh-tokoh Muhammadiyah dengan latar belakang pendidikan yang menjadi pejabat Jepang. Beberapa diantaranya adalah Haji Hadjid, Abdul Kahar Muzakir, dan K.H. AR Fakhruddin. Haji Hadjid merupakan seorang kelahiran Kauman yang menjadi murid K.H. Ahmad Dahlan. Ia pernah menjadi guru di HIS Muhammadiyah dan *Standaardschool* Suronatan. Karena ketrampilannya, ia menjadi Direktur Madrasah Muallimin. Pada masa pendudukan Jepang, ia menjadi pegawai *Shumubu* (Kantor Lembaga Agama) Yogyakarta. Nama kedua adalah Abdul Kahar Muzakir. Tokoh Muhammadiyah kelahiran Kotagede ini mengenyam pendidikan di Arab Saudi dan Mesir. Sekembalinya ke Indonesia, ia dipercaya menjadi direktur Madrasah Muallimin. Pada masa Jepang, ia menjadi pegawai kantor pemerintahan Yogyakarta. Hanya dalam waktu yang tidak begitu lama, ia kemudian dipercaya menjabat sebagai Wakil Kepala Kantor Agama (*Shumubu*) Pusat di Jakarta, dan pada puncaknya ia berhasil menduduki lingkaran politik nasional selama akhir pendudukan Jepang hingga awal kemerdekaan (Nakamura, 2017: 140).

Selain menduduki jabatan dalam pemerintahan, beberapa tokoh Muhammadiyah juga dipercaya menjadi pasukan Peta (Pembela tanah air). Beberapa nama dari Yogyakarta yang dipercaya menduduki posisi strategis dalam Peta antara lain Muhammad Yunus Anis yang merupakan Sekretaris Pengurus Besar Muhammadiyah, Mohammad Saleh yang memiliki latar belakang Kepala SMP Muhammadiyah Yogyakarta, dan Onto Martojumeno yang merupakan Ketua Muhammadiyah Yogyakarta. Mereka dilibatkan untuk memberikan pendidikan bagi pemuda-pemuda Indonesia untuk membantu tentara Jepang dalam perang, baik dengan cara meningkatkan produksi makanan maupun meningkatkan keamanan di garis belakang. Pada 29 April 1943, secara resmi dibentuk *Fujinkai*, *Seinendan*, *Keibodan* dan *Heiho*. Banyak siswa Muhammadiyah di Yogyakarta yang kemudian bergabung dalam korps tersebut. Bahkan tidak sedikit lulusan sekolah Muhammadiyah yang kemudian menjadi bagian dari bagian ketentaraan ini

seperti Ali Hadi, lulusan Madrasah Muallimin yang berasal dari Gunungkidul (Margana, 2017: 80).

Tidak hanya dari pemerintah Jepang, Muhammadiyah juga menghadapi serangan dalam penyelenggaraan pendidikan dari komunis. Sanusi Pane, salah satu tokoh dari kaum komunis mendesak pemerintah Jepang untuk menghapus sistem pendidikan swasta. Alasannya kebutuhan terhadap sekolah swasta telah hilang seiring dengan berakhirnya kolonialisme Belanda (Arifin, 2016: 188).

Reaksi Muhammadiyah Menghadapi Kebijakan Jepang

Kebijakan pemerintah Jepang pada mulanya bersifat lunak untuk mengambil hati masyarakat Indonesia. Akan tetapi, kebijakan keras khas militer kemudian diambil setelah kondisi Jepang dalam Perang Dunia ke-2 semakin terdesak. Menghadapi kondisi yang tidak begitu menguntungkan, jajaran pengurus Muhammadiyah umumnya mengambil sikap bertahan, tidak terkecuali bidang pendidikan (Mawardi, 1978: 13). Sebagian kegiatan Muhammadiyah terhenti atau dijalankan dalam bentuk lain untuk menghadapi kebijakan Jepang. Sekolah yang tetap berjalan umumnya mendapat tekanan agar melangsungkan pembelajaran berdasarkan arahan pemerintah Jepang.

Pada masa ini, lembaga pendidikan Muhammadiyah ada yang dapat dibuka namun sebagian juga masih harus ditutup. Aisyiyah sebagai organisasi sosial kemasyarakatan saat itu masih bisa melakukan kegiatan pengajian seperti biasanya, namun masih harus tergabung dalam *Fujinkai*. Madrasah dan sekolah saat itu umumnya ditutup, sehingga untuk mengatasi peraturan ini dibuat menjadi pengajian rutin. Madrasah Muallimat berganti nama menjadi PMA (Pengajian Menengah Aisyiyah) karena statusnya sebagai Madrasah swasta (PP Aisyiyah, tt: 43). Oleh karena itu kesempatan pendidikan untuk perempuan pada masa ini masih terbatas, terutama yang teralifiasi dengan swasta salah satunya Muhammadiyah.

Dalam kurikulum pendidikan agama, Muhammadiyah tidak ikut terlibat dalam pelatihan Kiai yang dilakukan Jepang. Muhammadiyah mengadakan kursus sendiri di Ponorogo. Langkah ini juga diikuti dengan meningkatkan kegiatan

tabligh di cabang-cabang Muhammadiyah seluruh Jawa serta penataan kembali kegiatan pendidikan dan kemanusiaan (Arifin, 2017: 202).

Setelah tiga bulan pemerintahan Jepang berjalan, masyarakat mulai merasakan tekanan karena peraturan-peraturan baru yang lebih mengekang. Sebelum memasuki sekolah atau kantor, para siswa maupun pegawai wajib melaksanakan senam yang disebut *taisho*, kemudian mengucapkan sumpah, dan dilanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, *Kimigayo*. Setelah itu, para pegawai dan siswa melakukan penghormatan ke arah Tenno Heika yang bertahta di Tokyo dengan cara membungkukkan badan atau *seikirei*. Penghormatan atau *seikirei* kepada Tenno Heika ini dapat disamakan dengan ruku' dalam shalat bagi umat Islam (Majelis Diklitbang dan LPI PP Muhammadiyah, 2010: 113).

Aturan *seikirei* ini meresahkan bagi umat Islam pada saat itu. Sebagai organisasi Islam, Muhammadiyah memimpin umat Islam saat itu untuk melakukan protes atas peraturan tersebut. Muhammadiyah menyatakan bahwa umat Islam tidak dibenarkan melakukan penghormatan tersebut walaupun untuk seorang raja. Oleh karena itu, Ki Bagus Hadikusuma berdiskusi dengan pengurus Muhammadiyah lainnya dan memutuskan untuk membuat pengumuman yang menyatakan bahwa umat Islam tidak boleh melakukan *seikirei* karena hal ini bertentangan dengan agama Islam (Lasa, 2007: 17). Tidak hanya oleh pengurus besar Muhammadiyah, kebijakan ini juga ditentang oleh Haji Abdul Karim Amrullah atau Haji Rasul di Sumatera.

Setelah pengumuman yang dilakukan oleh Ki Bagus Hadikusuma untuk tidak melakukan *seikirei*, Muhammadiyah kemudian menyebarkan konsepsi tauhid untuk mengimbangi doktrin pendewaan kaisar Jepang. Cara ini dilakukan dengan membetuk mubalighin istimewa ke seluruh Jawa yang dikelola oleh Haji Yunus Anis. Mereka dikirim ke cabang-cabang Muhammadiyah, sekolah-sekolah milik Muhammadiyah, dan pertemuan-pertemuan Muhammadiyah untuk tidak melaksanakan *seikirei* (Majelis Diklitbang dan LPI PP, 2010: 115).

Pengumuman yang dilakukan oleh Ki Bagus Hadikusumo segera ditaati oleh seluruh warga Muhammadiyah. Hal ini menarik perhatian Pemerintah Jepang. Ia kemudian dipanggil oleh Gubernur Militer di Yogyakarta. Pemanggilan ini

menimbulkan kekhawatiran Ki Bagus Hadikusumo dan pengurus Muhammadiyah. Mereka merasa takut jika Ki Bagus Hadikusuma akan disiksa oleh tentara Jepang. Ki Bagus Hadikusuma kemudian mendatangi Gunseikan. Pada mulanya, ketika ia masih di alun-alun, timbul keraguan dalam hatinya dan ia kembali ke rumah untuk shalat. Setelah merasa yakin, ia kemudian menghadap *Gunseikan*. Saat menghadap Gunseikan, ia ditanya mengenai larangan seikirei bagi umat Islam dan murid-murid sekolah Muhammadiyah, maka dengan tegas dijawab bahwa seikirei dilarang dalam ajaran Islam. Sikap Ki Bagus Hadikusuma ini didukung oleh K.H. Mas Mansur dan Abdul Kahar Muzakir. Mas Mansur menyebut bahwa orang Islam tidak akan menolak ajakan Jepang selama tidak menyinggung agamanya. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Abdul Kahar Muzakir yang menyatakan bahwa prinsip *lakum diinukum waliyadin* (bagimu agamamu, bagiku agamaku) perlu menjadi pegangan bagi Jepang untuk menjalin relasi dengan Islam (Arifin, 2016: 191-192).

Pemerintah Jepang kemudian mengirimkan Miyoshi untuk menanyakan perihal seikirei kepada Mohammad Hatta untuk menanyakan kenapa sebagian umat Islam menolak seikirei namun sebagian lainnya memperbolehkan. Mohammad Hatta menjawab bahwa Islam mengajarkan untuk memberikan penghormatan kepada seseorang yang ada di hadapannya, akan tetapi *seikirei* terhadap Tenno Heika yang jauh di Tokyo tidak diperbolehkan dalam Islam, karena hal itu berarti meninggikan Tenno Heika dibandingkan dengan Allah SWT. Pendapat Hatta menguatkan pernyataan dari tokoh-tokoh Muhammadiyah yang kemudian membiarkan sekolah-sekolah Muhammadiyah tidak melakukan *seikirei* (Arifin, 2016: 192).

Seiring berjalannya waktu, nama Ki Bagus Hadikusumo kemudian lebih dikenal dan berpengaruh dalam kalangan tentara Jepang. Ini terbukti saat Jepang mengundang tiga orang tokoh Indonesia, yaitu Sukarno, Mohammad Hatta, dan Ki Bagus Hadikusumo untuk bertemu kaisar. Diundangnya Ki Bagus Hadikusumo adalah sebagai wakil dari umat Islam, sedangkan Sukarno merupakan wakil dari nasionalis. Ki Bagus juga menjadi salah satu anggota badan penasihat atau *Chuo Sangi In* yang dibentuk pada September 1943 (Kahin, 2013: 151).

PENUTUP

Pemerintah militer Jepang memandang umat Islam sebagai salah satu kekuatan pendukung yang akan memenangkan mereka dalam Perang Dunia ke-2. Kebijakan pendidikan pada masa ini dikembangkan untuk memenuhi tujuan militer. Pimpinan Muhammadiyah beradaptasi menghadapi kebijakan ini dengan tujuan organisasi agar selaras dengan pemerintah Jepang. Untuk menjaga agar organisasi tetap berjalan, kepemimpinan Muhammadiyah kemudian dibagi berdasarkan wilayah pulau karena Jepang saat itu melarang penduduk untuk melakukan pergerakan antarpulau.

Pendidikan Muhammadiyah di Yogyakarta mengalami penurunan kualitas bahkan kuantitas jika dibandingkan dengan masa penjajahan Belanda. Penyebab kemunduran ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi saat itu yakni diangkatnya guru-guru Muhammadiyah untuk menduduki jabatan di politik maupun militer. Selain itu, murid-murid sekolah Muhammadiyah juga melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kemiliteran seperti senam, kerja bakti, dan bahkan ada juga yang mendapat pendidikan militer. Dalam waktu yang tidak begitu lama, sekolah-sekolah Muhammadiyah banyak yang kemudian tutup karena kekurangan finansial. Hanya sekolah yang berada di kota Yogyakarta yang masih bertahan.

Sikap Muhammadiyah menghadapi kebijakan Jepang cenderung ke arah bertahan dan bekerjasama untuk mempertahankan aktivitas organisasi seperti menyamakan aktivitas Madrasah Mualimat yang saat itu tidak mendapat izin untuk menjalankan kegiatan belajar mengajar. Langkah ini ditempuh untuk mempertahankan pendidikan perempuan. Meskipun begitu, kebijakan ini membatasi ruang gerak perempuan untuk mengakses pendidikan.

Salah satu kebijakan yang menyinggung umat Islam adalah *seikirei* atau membungkuk ke arah matahari terbit sebagai penghormatan kepada kaisar Jepang. Ki Bagus Hadikusuma sebagai Ketua Muhammadiyah kemudian memprotes kebijakan ini karena dianggap seperti menyembah Kaisar. Menghadapi sikap dari Ki Bagus Hadikusuma, pemerintah Jepang kemudian tidak mewajibkan lagi *seikirei* di sekolah-sekolah Muhammadiyah.

Meskipun hampir secara keseluruhan berdampak buruk bagi kondisi sekolah Muhammadiyah, akan tetapi ada beberapa kebijakan pemerintah militer Jepang yang memiliki pengaruh positif bagi pendidikan saat itu jika dibandingkan dengan masa kolonialisme Belanda. Pada masa ini sistem pendidikan yang terkotak-kotak pada masa Belanda menjadi satu kesatuan sehingga memudahkan siswa untuk meneruskan pembelajaran ke jenjang yang lebih tinggi. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar berdampak penting meningkatkan persatuan nasional saat itu hingga masa-masa berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M.T., 2016. *Muhammadiyah Potret yang Berubah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Benda, Harry J., 1985. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, terj. Daniel Dhakidae. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Besluiten van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie 22 den Augustus 1914 (No. 81)*.
- Besluiten van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie 2 den September 1921 (No. 36)*.
- Buchori, Mochtar, 2007. *Evolusi Pendidikan di Indonesia dari Kweekschool sampai ke IKIP*. Yogyakarta: INSISTPress.
- Darban, Ahmad Adaby dan Musthafa Kamal Pasha, 2009. *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*, Yogyakarta: Surya Mediatama.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1977. *Sejarah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Gottschalk, Louis, (peny.). 2008. *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Hadikusuma, Djarnawi, 2010. *Matahari-matahari Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Kahin, George McTurnan, 2013. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu.
- Kuntowidjojo, 1985. "Muslim Kelas Menengah Indonesia dalam Mencari Identitas 1910-1950" dalam *Prisma*, No. 11.

- Kurniawati, Asti, 2012. *Membangun (?) Narasi, Menghadirkan Pesona: Akar dan Perjalanan Citra Yogyakarta "Kota Pendidikan"*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Lasa H.S., dkk, 2014. *100 Tokoh Muhammadiyah yang Menginspirasi*, Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Muhammadiyah.
- Margana, Sri, dkk., 2017. *Gelora di Tanah Raja: Yogyakarta Pada Masa Revolusi 1945-1949*. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mawardi, Mh., Mei 1978. "Perkembangan Perguruan Muhammadiyah: Dengan Benih Pengajian dan Sekolah Kyai (II) dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 10, Th. ke-58.
- Majelis Diktilitbang dan LPI PP Muhammadiyah, 2010. *1 Abad Muhammadiyah Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Mulkhan, Abdul Munir, 1990. *Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nakamura, Mitsuo, 2017. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit di Atas Pohon Beringin: Studi tentang Pergerakan Muhammadiyah di Kotagede sekitar 1910-2010 Edisi Revisi Ditambah Bagian Dua*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Noer, Deliar, 1980. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- PP. Aisyiyah, tt. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Aisyiyah*, Yogyakarta: PP. Aisyiyah Seksi Khusus Penerbitan dan Publikasi.
- Ricklefs, M.C., 2011. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Setiawan, Farid, 2015. *Genealogi dan Modernisasi Sistem Pendidikan Muhammadiyah 1911-1942*. Yogyakarta: Semesta Ilmu.
- Steenbrink, Karel A., 1974. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES.
- Suminto, H. Aqib, 1985. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES.
- Surjomihardjo, Abdurrachman, 1985. "Yang Lebih Dahulu dari Tokoh Politik" dalam *Prisma*, No. 11.
- Suwarno, P.J., 2003. *Tatanegara Indonesia dari Sriwijaya sampai Indonesia Modern*. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Sanata Dharma.

- Wahyono, Tugas Tri, 2013. “Pengawasan Pemerintah Hindia Belanda Tentang Pengajaran Agama Islam: Studi Kasus pada Lembaga Pendidikan Muhammadiyah (1912-1942) dalam *Patrawidya*, Vol.14 No.1 Maret. Hlm. 173-196.
- Wahyono, Tugas Tri, 2017. “Perlawanan Muhammadiyah Terhadap Ordonansi Guru 1925 dan Ordonansi Sekolah Liar 1932” dalam Nurhajarini, Dwi Ratna, dkk, *Merajut Kebhinekaan, Membangun Indonesia: Perspektif Sejarah dan Budaya*, Yogyakarta: BPNB D.I. Yogyakarta.
- Wirawan, Yerry. 2017. “Menjadi Jawa: Sejarah Missionaris dan Zending di Yogyakarta” dalam Nurhajarini, Dwi Ratna dkk., *Meneguhkan Identitas Budaya: Sejarah Pendidikan di Yogyakarta*. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.